BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari sebuah negara yang memiliki peranan yang sangat besar dalam sebuah negara. Secara nyata desa berbeda dengan negara yang dimana negara memiliki kedaulatan tertinggi atas rakyat, negara dan pemerintahan. Akan tetapi walaupun secara nyata berbeda ada kemiripan antara desa dengan negara. Kemiripan yang dimaksud yaitu dalam susunan pemerintahan baik legislatif,eksekutif maupun yudikatif walaupun hanya dapat dilaksanakan dengan sistem dan cara yang sederhana. Selain itu juga dalam pemilihan kepala desa juga hampir mirip dengan pemilihan kepala negara dengan cara pemilihan hanya saja dilaksanakan dengan cara dan teknis yang sederhana. Selain itu pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang mana pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam terciptanya pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, desa memiliki keistimewaan yang tidak terbatas yaitu dapat mengelola aset desa, jasa, pelayanan didesa tersebut akan tetapi masih dalam tahap pengawasan juga oleh pemerintahan pusat. Pengelolaan aset desa, jasa dan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Des. Badan usaha tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan desa dari berbagai macam segi baik dari segi perekonmomian, agama dan lain sebagainya. Pengembangan ini

dengan tujuan agar kedepannya desa dapat berdiri tegak menjadi desa yang mendiri dapat menghasilkan pendapatan desa dengan memanfaatkan peluang yang ada di desa seperti aset desa.

Dalam kenyataannya desa sering dipandang sebelah mata oleh khalayak umum dikarenakan dalam pemerintahan dan pengelolaan aset desa, pemerintahan desa masih dianggap belum mampu. Padahal dalam kenyataannya banyak desa yang mampu melaksanakan pemerintahan dan juga mengembangkan aset desa dengan baik. Menurut Permendes Nomor 2 tahun 2016 menyatakan bahwa desa tersebut memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya ketahanan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Pemerintahan desa juga ada yang telah mampu mengembangkan potensi desa dengan baik dan benar dengan tujuan pengembangan ekonomi di desa tersebut. Dengan adanya pengembangan potensi desa tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara mandiri dalam mengatur perekonomianya.

Potensi yang ada di Desa Bejiharjo sendiri bisa dikatakan lebih melimpah dibandingkan dengan wilayah desa lainnya. Dimana hal ini terlihat dari banyaknya sumber air bawah tanah dan juga gua-guan serta tempat wisata lainnya seperti sejarah dan tempat pendidikan menjadikan Desa Bejiharjo lebih banyak memiliki potensi alam yang disebut dengan aset desa dibandingkan dengan desa lainnya. Faktor inilah yang menyebabkan Desa Bejiharjo sendiri bisa dikatakan lebih banyak potensi desa atau aset desa dibandingkan dengan desa lainnya.

Dalam pengelolaan aset desa yang ada di Desa Bejiharjo sendiri dilakukan oleh pihak BUM desa yang memiliki nama Maju Mandiri. Dalam setiap program yang dijalankan oleh BUM des tersebut dibandu juga oleh suatu lembaga yang salah satunya hyaitu Karang Taruna.

Selain dalam pengembangan aset desa dengan tujuan pengembangan ekonomi desa ini, pemerintah desa dibantu oleh pemerintah pusat dengan adanya dana desa. Dana desa ini dicairkan seiring juga dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan aset desa, jasa, pelayanan pemerintah desa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat yang sering disebut dengan dana desa. Dana tersebut selanjutnya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan kegiatan desa, pengembangan desa dan dapat digunakan kegiatan lainnya selama masih dalam lingkup keperluan desa. Sebagian dari dana desa ini dikelola oleh pemerintah desa untuk pengelolaan aset desa seperti tempat wisata, dan segala aset desa yang dapat meningkatkan poerekonomian desa tersebut.

Dalam pengalokasiaan dana desa tersebut pemerintah diharapkan menggunakan dengan sebaik-baiknya agar tercapai tujuan desa yang berkemajuan. Dengan demikian pemerintah desa yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Dari sinilah terlihat bahwa pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada pemerintahan desa akan tetapi juga dari bagaimana masyarakat berpatisipasi, mengontrol

pemerintahan desa serta turut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.

Partisipasi yang dituntut tidak hanya berupa pengawasan terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah, akan tetapi partispasi yang diharapkan lebih kepada perwujudan dari bentuk berubahnya pola pikir peran masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya prinsip “dari dan untuk masyarakat” ini diaplikasikan dengan bahwa peranan masyarakat tidak hanya sebatas dengan penerimaan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa, melainkan dengan turut serta dalam pemerintahan desa membangun desa yang dalam kenyataanya juga memiliki perananan dan fungsin masing-masing. Dalam hal ini masyarakat juga ikut turut serta dalam pengalokasian dana tersebut. Peranan dari masyarakat desa tersebut akan berdampak baik kedepannya baik dalam hal transparansi dana dan juga bagaimana peran dari masyarakat tersebut untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan desa.

People power atau kekuatan masyarakat yang memiliki tujuan dan maksud yang sama agar tercapainya kepentingan yang sama dari rakyat tersebut dirasa sangat penting dalam sebuah pemerintahan desa. Peranan atau partisipasi masyarakat desa ini dapat dilaksanakan ketika masyarakat mengikuti musyawarah yang ada di tingkat desa yaitu musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintahan desa melaksanakan kinerjanya dan bagaimana

pengalokasian dana yang ada dan juga masyarakat dapat mengusulkan atau menyanggah apabila ada yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Selain itu juga faktor dari pemberdayaan masyarakat juga menjadi sangat penting dalam penunjang peranan people power ini. Pemberdayaan atau powerless merupakan pemberdayaan dasar yang memberikan kekuatan kepada masyarakat yang tidak berdaya agar memiliki kekuatan dalam mengaktualisasi diri didalam lingkungan masyarakat (Harry Hikmat, 2001: 46-48). Pemberdayaan masyarakat ini juga diterapkan pada Desa Bejiharjo dimana desa ini memiliki kekayaan alam yang sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar yaitu tempat wisata gua pindul. Pemberdayaan yang diterapkan yaitu dalam bentuk kelompok sadar wisata yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memiliki kesadaran serta kemauan untuk mengelola dan mengembangkan desanya. Kelompok sadar tersebut dinamakan dengan Tunas Wisata dibentuk dengan tujuan agar kelompok masyarakat tersebut memiliki kesadaran akan aset desa tersebut yaitu tempat pariwisata dalam bentuk gua pindul. Selain itu juga tujuan dari kelompok ini yaitu bertujuan untuk pengembangan kemajuan desa berbasis ekonomi melalui pengembangan destinasi pariwisata tersebut.

Dengan adanya kelompok masyarakat yang sadar akan desa ini menunjukan bahwa di Desa Bejiharjo Kabupaten Gunung Kidul ini memiliki peran people power yakni peranan dari warga sekitar, karang taruna, BUM Des dan juga Pokdarwis dalam perkembangan ekonomi di desa tersebut melalui pengembangan aset desa berupa gua pindul. Dalam hal ini peranan yang

dilakukan yaitu dalam bentuk masyarakat disadarkan akan pentingnya pengetahuan pengembangan desa berbasis ekonomi ini. Dengan ini partisipasi masyarakat sekitar perlahan akan bertambah dengan terlihatnya manfaat dari adanya kelompok sadar wisata dan juga bagaimana peran pencetus dari desa sadar wisata tersebut untuk merangkul masyarakat sekitar agar ikut berpartisipasi dalam oengembangan desanya. Maka dari itu penulis memiliki tujuan untuk meneliti sejauh manakah peran dari kelompok sadar wisata tersebut dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat disana.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang diteliti. Peneliti mengajukan pertanyaan ini sebagai masalah umum yang tidak dimaksudkan untuk membatasi penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peranan *people power* terhdap kebijakan pemerintah desa dalam perkembangan ekonomi di Desa Bejiharjo Kecamatan Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *people power* terhdap kebijakan pemerintah desa yang akan diambil di Desa Bejiharjo Kecamatan Karamg Mojo Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya partispasi masyarakat pada kegiatan pemerintahan desa memiliki fungsi bagi seorang peneliti untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari hasil yang telah diteliti. Dari hasil penelitian tersebut kedepannya diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan oleh penulis yaitu kesempatan untuk mendalami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan khususnya yang berkaitan dengan kajian penulisan mengenai peranan *people power* dalam pengambilan kebijakan pemerintah desa dalam perkembangan bidang ekonomi di suatu desa.

2. Manfaat praksis

a. Bagi masyarakat yaitu pengetahuan peranan people power atau gerakan massa dan bagaimana masyarakat turut berpartisipasi dalam mengembangkan perkonomian desa melalui peranan *people power* gerakan yang ada di desa tersebut.

b. Bagi pemerintah desa yaitu lebih kepada bagaimana pemerintahan memanfaatkan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam setiap hal pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memajukan desa tersebut.

c. Bagi Karang Taruna Desa Bejiharjo Kecamatan Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan bagi Karang Taruna desa setempat dalam pengelolaan tempat wisata yang ada di desa tersebut sehingga dapat menambah pendapatan dari tempat wisata tersebut dan juga agar tempat wisata tersebut tetap menjadi salah satu tempat wisata yang ingin dikunjungi oleh masyarakat.

d. Bagi kelompok sadar wisata Tunas Wisata penelitian ini bertujuan agar kedepannya pengelolaan yang ada di dalam kelompok ini bertambah menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga diharapkan bahwa kedepannya ada lagi inovasi-inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata tersebut.

1.5. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil studi terdahulu dan pernyataan pengambil kebijakan yang dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang peranan *people power* atau gerakan masa dalam pengambilan kebijakan antara lain :

Dalam Penelitian tentang Dampak Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) di Desa Tawangrejo Kacamatan Turi Kabupaten Lamongan (studi kasus kelompok ternak sumber rejeki) menjelaskan bahwa latar belakang adanya gerakan gemerlap ini yaitu minimnya alat penunjang produksi pertanian, terbatasnya kemampuan untuk meningkatka kualitaas dan produk nilai tambah di desa tersebut. Dengan adanya kelompok gemerlap yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat sekitar merasakan banyak manfaat yang ada antara lain manfaat individu, manfaat lembaga dan manfaat bagi unit-unit sosial. Dampak bagi masyarakat sekitar yaitu bahwa adanya peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dengan bertambahnya pendapatan dari hasil adanya program tersebut. Selain itu juga dengan adanya program dari pemerintah ini dengan adanya koperasi yang ada di wilayah tersebut yang kedepannya dapat membantu apabila masyarakat sekitar mengalami kesulitan (Anita, 2016:5).

Penelitian selanjutnya yaitu menurut Puja, 2002 dalam (Rohim, 2013:12) mengenai Pola Pengembangan Pariwisata Terpadu Bertumpu Pada Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Bali Tengah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan profil wilayah tersebut yang

mencerminkan bahwa suatu keadaan sosial budaya dan lingkungan agraris yang oleh warga sekitar diberi nama dengan “Pariwisata Subak” yang berbasiskan potensi sosial budaya dan ekologi pertanian. Dalam pengelolaan tempat pariwisata tersebut mengutamakan peran dari masyarakat setempat sehingga kelak akan memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi serta pelestarian budaya dan lingkungan setempat.

Penelitian terakhir yaitu mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata Oleh Kelompok Sadar Wisata Tunas Wisata di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian tersebut, peneliti menuliskan bahwa adanya peranan kelompok sadar wisata yang memiliki tujuan untuk pengembangan pariwisata yang ada di desa tersebut. Dalam penelitian ini juga peneliti menuliskan bentuk pemberdayaan yang diterapkan di kelompok sadar wisata tersebut dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah adanya kelompok sadar wisata tersebut.

Secara garis besar penelitian tersebut menggunakan metode analisis kualitatif yang menjelaskan bagaimana peranan dari kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat wilayah sekitar dari sektor pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini hanya bersifat sebagai pelengkap saja untuk penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu sejarah adanya kelompok sadar wisata Tunas Wisata tersebut, bagaimana peranan *people power* atau kelompok sadar wisata yang ada di wilayah Desa Bejiharjo tersebut untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk memajukan

pariwisata guna pengembangan ekonomi masyarakat. Bagaimana perbedaan yang terlihat setelah adanya kelompok sadar wisata tersebut terhadap ekonomi masyarakat tersebut. Selain itu juga penulis akan membahas bagaimana manfaat jangka panjangnya setelah adanya kelompomk sadar wisata ini untuk kemajuan ekonomi Desa Bejiharjo (Sari, 2012:12).

1.6. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan seperangkat variabel yang saling terikat satu sama lain, yang berasosiasi dengan proporsi atau hipotesis yang merinci pada hubungan antar variabel (Cresswell, 2013). Untuk mewujudkan hal yang menjadi tujuan penelitian maka diperlukan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kerangka teori yang dimaksudkan yaitu tentang *people power*, kebijakan dan desa.

1.6.1. People Power/Gerakan Massa

Menurut Gaventa (dalam (Agus, 2017:19) kekuasaan dapat dipahami melalui tiga dimensi yaitu dimensi ruang (*space)*, bentuk *(form)*, dan tingkatan *(level).* Teori ini digambarkan oleh Gaventa berbantuk kubus yang berasal dari teori Lukes dalam bukunya yang berjudul *Power a Radical View*. Ketiga dimensi yang dijelaskan dalam buku tersebut yakni:

1) Kekuasaan berfokus pada satu tindakan aktor mengambil keputusan

2) Kekuasaan berfokus pada kepentingan subjektif aktor dalam bentuk pilihan atau keluhan

3) Kekuasaan memperhatikan aspek pembuatan kebijakan dalam agenda politik dan sekaligus melihat kontrol terhadap agenda tersebut.

Gaventa berusaha menganalisa bagaimana pemerintahan itu berjalan dengan partisipasi maupun tanpa partisipasi. Kekuasaan dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap kelompok lainnya. Dalam teori tersebut, Gaventa memudahkan kita dalam menganalisis dalam hal yang berperan dalam kekuasaan, aktor yang berperan, permasalahan dan situasi yang melatarbelakangi kekuasaan tersebut (Agus, 2017:19-25).

1) Dimensi Ruang Kekuasaan

Didalam dimensi ini identik dengan partisipasi masyarakat dan demokrasi. Selain itu juga dimensi ini dapat diasumsikan dalam berbagai bentuk seperti ruang politik, ruang kebijakan dan ruang demokratis. Dari ketiga ruang tersebut partisipasi masyarakat menjadi titik awal bagi ruang yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan

a. *Closed Space*

Pengambilan kebijakan dimaksudkan agar adanya partisipasi masyarakat, meskipun begitu masih ada ruang tertutup yang hanya bisa diakses beberapa aktor. Ruangan ini menjadikan aktor yang berada dalam kekuasaan tertutup tersebut dapat mengambil kebijakan tanpa melibatkan masyarakat.

b. Alinvited Space

Ruang ini ditunjukan bagi masyarakat untuk memperluas partisipasinya. Masyarakat diharapkan turut serta dalam pengambilan keputusan dalam proses kebijakan tersebut.

c. *Claimed/Created Space*

Ruang ini hadir sebagai hasil klaim dari aktor yang berada di luar negara atas ketidakpuasan terhadap ruang yang telah disediakan. Ruang ini berasal dari kekhawatiran bahwa *invited space* tidak representatif dan netral.

2) Dimensi Level Kekuasaan

a. Level Lokal

Level ini sangat penting untuk membantu menyusun perencanaan, pengalokasian dan pemantauan anggaran serta memegang institusi di tingkat lokal yang paling dekat dengan warga negara.

b. Level Nasional

Level nasional merupakan *entry point* untuk mencapai perubahan yang dituju. Level ini memiliki legitimasi yang diakui level lokal maupun global.

c. Level Global

Dalam konteks global, dinamika kekuasaan yang mengelilinginya menjadi komplek karena semakin banyak aktor dan kepentingan.

3) Dimensi Bentuk Kekuasaan

a. Visible Power

Terdapat dua asumsi dalam *visible power* ini yang pertama publik mngartikulasikan keluhannya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan formal bersama masyarakat yang memiliki otoritas sehingga proses kebijakan lebih demokratis dan akuntable setra melayani kebutuhan publik. Yang kedua yaitu berguna untuk mengidentifikasi aktor yang mana memengang kekuasaan atau memiliki kepentingan dengan cara menjadikan ruang partisipasi sebagai ruang perdebatan secara terbuka.

b. Hidden Power

Dalam *hidden power* ini cara yang dilakukan yaitu mengawasi ruang gerak partisipasi dengan membatasi isu apa saja yang boleh dibahas di masyarakat.

c. Invisible Power

Dalam bentuk kekuasaan ini *invisible power* hampir sama dengan hidden power yang berusaha membatasi pertisipasi hanya saja dalam *invisible power* ini berusaha menutup partisipasi dengan cara mempengaruhi kesadaran individu, mendominasi nilai dan ideologi bentuk dan perilaku kelompok.

People power (gerakan masa) atau lebih dikenal masyarakat dengan kaum berpengaruh merupakan kaum yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengaruh secara tidak langsung (Agus, 2017:16).Gerakan sosial merupakan gerakan yang terlahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menurut perubahan dalam konstitusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Dalam gerakan sosial secara sosiologis diklasifikasikan sebagai perilaku atau aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu.

Menurut (Nanang, 2011:224) gerakan sosial dimaknai sebagai sebuah gerakan yang lahir dari kelompok individu utnuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi, atau menuntut adanya perubahan yang ditunjukan oleh sekelompok tertentu.

Menurut Renzo 1990 (dalam Soeyeono,2005:3) dalam (Kia, 2012)) gerakan masa merupakan perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan yang lebih baik. Tujuan akhir dari gerakan sosial yaitu tidak hanya sebatas dari perubahan sikap dan perilaku individu melainkan sebuah perubahan tatanan sosial. Sedangkan menurut Soeyeono (dalam Baldrige 1989:299 dalam (Kia, 2012) gerakan sosial merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisir untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi perubahan. Organisasi gerakan harus mempunyai tujuan dan struktur organmisasi yang jelas serta memiliki ideologi yang secara jelas berorientasi pada perubahan. Gerakan

tersebut dilakukan secara sadar dan jelas mempromosikan kebijakan-kebijakan yang ingin dilaksanakan.

Gerakan sosial atau *sosial movement* merupakan aktivitas sosial berupa gerakan sejenis kelompok informal yang dibentuk dalam organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada satu isu sosial atau politik dengan melaksanakan ataupun menolak sebuah perubahan sosial (Dzarroh, 2013).

Gerakan Sosial Ekonomi adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki visi, misi, tujuan, ide, nilai sosial ekonomi yang sama (mempertahankan, merubah, mengontrol, dan menjalankan kehidupan sosial ekonomi); yang dilakukan secara sistematis, terorganisir (dalam bentuk kelompok pelajar/mhs, LSM, ormas, pers, pressure group, lembaga ekonomi, dll) dan bertahan cukup lama.

Menurut Kurniawan, 2014:84 (dalam Abror, 2013) gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekolompok orang sebagai aksi kolektif, baik untuk mendukung dan atau menentang keberlakukan suatu nilai atau norma tertentu, maka dalam proses bekerjanya gerakan ini harus bertumpu pada daya intelektual yang dimiliki individu atau kelompok tersebut.

Berikut ini merupakan beberapa teori tentang gerakan sosial :

1) Teori Tindakan

Teori ini banyak berkonsentrasi dalam kondisi-kondisi diluar tindakan atau tingkah laku manusia dalam hal keseluruhan sosial.

2) Teori Nilai Tambah

Teori ini dikutip dari kajian ekonomi dimana menghasilkan nilai tambah, tujuan utamanya yakni dalam bidang ekonomi.

3) Teori Mobilitas Sumber Daya

Dalam teori ini yang dimaksudkan sumber daya yaitu keahlian atau pengalaman, keuangan, sumber informasi dan legitimasi. Berdasarkan teori ini gerakan sosial dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya yang ada yang sangat menentukan keberhasilan kesinambungan bahkan kemunduran dan kehancuran gerakan sosial. Faktor utama dari gerakan sosial ini yaitu sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya.

4) Teori Proses Politik

Proses politi berperan dalam gerakan situasi sosial politik dalam masyarakat dimana merupakan keberpihakan negara kepada kepentingan publik.

Fungsi dari gerakan sosial sekunder atau “laten” dapat dilihat sebagai berikut :

1) Gerakan sosial memberikan sumbangsih ke dalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi masalah sosial dan politik melalui penggabungan sejumlah gagasan gerakan kedalam opinin publik

2) Memberikan pelatihan para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik.

Tipe gerakan sosial menurut Aberle adalah sebagai berikut :

1) Alternative Movement

Dalam tipe ini, gerakan sosial memiliki tujuan untuk merubah perilaku perorangan.

2) Rodemptive Movement

Tujuan dalam gerakan sosial ini yaitu lebih luas dibandingkan dengan alternative movement, karena yang hendak dicapai adalah perubahan menyeluruh pada perilaku perorangan tersebut

3) Reformative Movement

Gerakan ini memiliki tujuan yang hendak dirubah yakni kaum masyarakat tertentu, tidak masyarakat secara umum.

4) Transformative Movement

Gerakan ini bertujuan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh.

Pada awalnya gerakan demokrasi ini ditandai dengan gerakan perlawanan dan gerakan protes, namun kini gerakan sosial yang ada di Indonesia sudah mengalami kemajuan dengan munculnya komunitas-komunitas yang perduli

terhadap keadaan lingkungan, anak, gender, dan permasalahan lainnya yang saat ini disebut dengan gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru di Indonesia ditandai dengan muculnya berbagai komunitas, asosiasi, serta LSM yang bergerak dalam berbagai bidang. Gerakan sosial yang mucul saat ini tidak hanya berupa gerakan perlawanan, namun gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan, seperti gerakan perempuan, gerakan lingkungan dan lain sebagainya. Menurut (Nugroho, 2015) perkembangan gerakan tersebut senada dengan kajian gerakan sosial yang berkembang seperti kajian tentang pola dan pengelolaan jaringan gerakan sosial.

Gerakan sosial baru berbeda dengan gerakan sosial klasik karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional dan fokusnya pada isu-isu budaya. Berikut adalah perbedaan antar gerakan sosial klasik dengan gerakan sosial baru dilihat dari empat indikator :

Tabel 1.Perbedaan gerakan sosial klasik dan gerakan sosial baru

No	Indikator	Gerakan Sosial Klasik	Gerakan Sosial Baru
1	Ideologi dan Tujuan	Berorientasi pada antikapitalisme, revolusi kelas dan perjuangan kelas	Berorientasi pada perubahan identitas, norma, dan gaya hidup yang mendukung tujuan dari gerakan sosial baru
2	Taktik dan Pengorganisasian	Melakukan aksi politik secara langsung, mengikuti model pengorganisasian serikat buruh industri dan kepartaian	Berinovasi untuk mempengaruhi opini publik, mobolisasi opini publik untuk mendapatkan tawar politik
3	Partisipan dan Aktor	Partisipan dan aktor berasal dari golongan-golongan tertentu, kaum marginal dan teralienasi	Berasal dari berbagai basis sosial yang melintasi kategori-kategori seperti gender, pendidikan, okupasi, dan kelas menengah, akademisi, bahkan mahasiswa
4	Medan dan Area	Terbatas dan hanya fokus pada isu-isu ekonomi, sosial dan politik	Melintasi batas-batas region: dari ras lokal hingga internasional, sehingga terwujud menjadi gerakan transnasional. Fokus gerakan ini yaitu isu-isu sosial kultural

Sumber : Menurut Carles Fexia (2009:10) (dalam Kusumaningrum, 2016:4)

Dalam tabel diatas menggambarkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara gerakan sosial klasik dengan gerakan sosial baru diliihat dari empat

indikator tersebut. Menurut (Martin, 2000) dalam (Kusumaningrum, 2016:4-5) teori gerakan sosial baru relevan digunakan karena berfokus pada perubahan kulktur masyarakat serta penyelesaian masalah.

Strategi dalam gerakan sosial tercantum dalam 6 pertanyaan yang merupakan indikator praktis untuk menganalisis gerakan sosial sekaligus sebagai petunjuk praktis bagi pelaku gerakan sosial untuk merancang atau memicu gerakan sosial

1) Kepercayaan

   Kepercayaan merupakan penguatan terhadap hal apa saja yang dianggap benar seperti ideologi, doktrin, pendangan, harapan, kerangka berfikir,wawasan, prespektif)

2) Organisasi

   Dalam organisasi ini, gerakan sosial mengajarkan bagaimana mempunyai pandangan yang sama, diatur dan diarahkan untukj mencapai tujuan, bagaimana masyarakat diajarkan untuk mengambil keputusan, cara memelihara agar masyarakat melaksanakan tugasnya tersebut.

3) Sebab-sebab

   Variabel yang berpengaruh terhadap gerakan sosial, bagaimana gerakan tersebut dibentuk, kapan gerakan tersebut dibentuk dan lain sebagainya.

4) Keikutsertaan

   Keikutsertaan ini meliputi sejauh mana keanggotaan dari masyarakat tersebut, mengapa orang tersebut ikut dalam gerakan, seberapa

jauh terlibatnya hingga siapa saja yang menjadi pendukung dalam gerakan tersebut.

5) Strategi

Strategi merupakan cara atau metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi yang dilakukan dapat secara terbuka maupun tertutup, terang-terangan atau sembunyi, menggunakan strategi secara frontal maupun secara halus.

6) Efek

Efek merupakan tanggapan atau reaksi kalangan luar terhadap gerakan sosial baik dari reaksi penguasa, elit, media, atau bahkan sesama gerakan sosial.

1.6.2. Kebijakan

Secara etimologis kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti negara atau kota, bahasa sanksekerta disebut dengan *pur* yang berarti kota, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara (William, 1998).

Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirkan oleh pelaku yang konsisten dan berulang baik dari yang mebuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut (Suharto, 2008). Kebijakan merupakan langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu (Winarno, 2003)

Menurut (Purwo, 2012:11) dalam (Fredrickson, 2003)Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

1.6.3. Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi atau disebut dengan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu penduduk meningkat dalam jangka waktu yang lama (Sadono, 2003). Pengembangan ekonomi local menurut Blakey dan Brandshaw dalam (Mulyana Nandang, 2017:116) yaitu proses diaman pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk meciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatka pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru (Mulyana Nandang, 2017:116).

Sedangkan menurut World Bank (2001) dalam (Mulyana Nandang, 2017:116) yaitu proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra daro sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk meciptakan kondisi lebih baik lagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melali pegembangan potensi ekonomi daerah ((sjafrizal,2008) dalam (Mulyana

Nandang, 2017:116). Potensi ekonnomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko 2002 dalam (Mulyana Nandang, 2017:116) bahwa kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga kan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat medorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya bersinambungan.

1.6.4. Desa

Menurut kamus besar bahasa Indonesia desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013).

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (H.A.W, 2003)Desa atau disebut dengan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa memiliki wewenang yakni :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak dan asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa

Selain memiliki wewenang desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014 yakni :

1. Desa memiliki hak
   a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak dan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
   b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
   c. Mendapatkan sumber pendapatan
2. Desa memiliki kewajiban
   a. Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
   b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Berdasarkan tinjauan geografisnya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik dan culyural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (Bintaro, 1989).

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih dapat dipahami (Azwar, 2007:72). Didalam penelitian ini didefinisikan istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. *People Power* merupakan suatu kekuatan masa yang berada didalam suatu lingkungan dengan tujuan dan maksud tertentu dimana peranan *people power* tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk turut serta dalam apa yang sedang dijalankan. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan *people power* yaitu kelompokm sadar wisata yang merupakan kumpulan warga yang ada di wilayah sekitar yang dibentuk dengan maksud dan tujuan tertentu, serta BUM Des yang merupakan suatu lembaga desa yang dibawah naungan pemerintah desa.

b. Kebijakan adalah sebuah tindakan dari seorang aktor yang memiliki tujuan atau maksud tertentu oleh seseorang, kelompok atau bahkan pemerintahan

dalam suatu lingkungan yang berhubungan dengan hambatan-hambatan guna mencapai apa yang diinginkan.

c. Desa merupakan satuan unit terkecil suatu negara yang memiliki batasan wilayah yang diakui oleh negara yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dari masyarakat yang hak asal-usulnya diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional meurut (Azwar, 2007:72) merupakan suatu definisi yang memiliki fungsi arti tunggal dan diterima secara obyektif apabila indikatornya tidak tampak. Adapun obyek dalam penelitian tentang Peran *People Power* terhadap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Perkembangan Ekonomi Desa Bejiharjo yaitu Karang Taruna dan BUM Desa dalam hal ini yang bertugas sebagai pengelola tempat wisata Gua Pindul. Sedangkan untuk indikator penelitian yang akan dilakukan ini yaitu :

a. Ideologi dan Tujuan
   - Perubahan identitas, norma, dan gaya yang mendukung tujuan
b. Taktik dan Pengorganisasian
   - Mempengaruhi opini publik
   - Melakukan proses lobbying (tawar menawar)

c. Pertisipan dan Aktor

- Aktor yang berperan didalamnya
- Ruang lingkup partisipan

d. Medan dan Area

- Sasaran
- Dampak yang dirasakan

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong(2002:50-51) mendifinisakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.9.2. Jenis Data

Menurut Azwar (2007:91) data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Jenis penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis data primer atau dengan kata lain bahwa data yang diperoleh dengan cara peneliti terjun langsung dalam pengambilan datanya.

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain :

- Catatan hasil wawancara.

- Hasil observasi lapangan.

- Data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1.9.3. Obyek dan Lokasi

Dalam penelitian kualitatif ini yang dimaksudkan dengan obyek adalah orang yang dilakukan penelitian yang sering disebut dengan populasi. Yang

menjadi populasi dalam penelitian Peran *People Power* terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Desa Bejiharjo adalah masyarakat Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, pemerintahan Dusun Gelaran Desa Bejiharjo dan juga orang-orang yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan Gua Pindul yang dalam hal ini yaitu BUM Des dan juga Karang Taruna Desa Bejiharjo yang menjadi pengelola tempat wisata Gua Pindul tersebut. Lokasi dalam penelitian ini yaitu terletak di wilayah Dusun Gelaran, Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Kota Yogyakarta.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

   Menurut Marzuki (2002:56) Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara melakukan tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian menggunakan teknik wawancara ini data yang didapat langsung dari responden atau informan yang dapat dipastikan kebenarannya.

Berikut ini merupakan profil narasumber dari subjek penelitian :

1) Agung Budi Nugroho., Amd selaku wakil direktur Badan Usaha Milik Desa di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo,. Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta

2) Bapak Yudan Hermawan, S.Pd selaku Ketua Karang Taruna Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta

3) Mbak Lois selaku anggota Karang Taruna dan juga pegawai dalam pengelolaan kelompok sadar wisata Tunas Wisata Dusun Gunungbang Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

2. Obeservasi

Menurut Sevilla (1993:198) merupakan suatu proses dimana peneliti mengamati secara langsung obyek penelitian. Observasi bertujuan untuk mengamati proses pelaksanaan dan hasil pelaksanaan dicatat oleh peneliti yang serta mencatat permasalahan apa saja yang bersangkutan dengan penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan Peran *People Power* terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Desa Bejiharjo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya lainnya dari sesesorang. Dalam teknik dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat mendukung kekuatan data yang ada. Dari data tersebut peneliti dapat mengetahui peristiwa yang telah lalu yang hingga saat penelitian dilaksanakan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1.9.5. Unit Analisis

Unit analisis data merupakan individu, perusahaan serta pihak-pihak lain yang memberikan respon terhadap perlakuan ataupun tindakan yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya (Maholtra, 2007). Didalam penelitiannya, peneliti menentukan unit analisis data yang diperlukan agar peneliti mengetahui dan menentukan masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kelompok Sadar Wisata yang diberi nama Tunas Wisata di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Alasan yang dipilihnya kelompok sadar wisata Tunas Wisata ini dikarenakan kelompok ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perkembangan ekonomi di wilayah Desa Bejiharjo tersebut.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis ini berfungsi sebagai penarikan kesimpulan dari data penelitian yang ada. Analisis data yang dilakukan yaitu berupa :

1. Reduksi Data

   Reduksi data atau merangkum yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan abstraksi dan transformassi data kasar yang diperoleh dilapangan studi (Sugiyono, 2009). Reduksi data yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa merangkum data, memilih hal pokok yang disusun lebih sistematis sehingga data yang didapat akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian. Selanjutnya pembuatan abstaksi atau intisari dari penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dan dikumpulkan lebih mudah untuk dikendalikan.

2. Penyajian Data

   Merupakan hasil dari reduksi data yang disajikan dalam bentuk laporan secara sistematis yang mudah untuk dipahami atau dibaca. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie, card, pictogram dan sejenisnya (Sugiyono, 2009). Dengan melihat sajian data, peneliti dapat lebih mudah untuk menarik atau mengambil kesimpulan dari sajian data yang ada dan juga peneliti dapat lebih mudah untuk memahami

apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman penulis.

3. Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2009). Dari keseluruhan data yang diperoleh, peneliti melakukan seleksi data yang mana akan ditampilkan dan kemudian dilakukan intrepretasi data atau dengan kata lain penulis berusaha mencari makna dan implikasi yang lebih luas tentang hasil penelitian. Berdasarkan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan untuk menjaring data tentang kontribusi dari Peran *People Power* terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Desa Bejiharjo.